

PENILAIAN KINERJA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2018

Wenny Widya Wahyudi

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta, Padang
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, Padang

Email korespondensi : wennyww4@gmail.com

ABSTRAK

Penilaian kinerja pembiayaan pembangunan suatu daerah sangat diperlukan untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang optimal. Kota Padang mempunyai rata-rata dana alokasi khusus paling rendah yaitu sebesar 4,29%, padahal kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu pada penelitian ini Peneliti bertujuan untuk menilai kinerja keuangan daerah Kota Padang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan bantuan diagram dan tabel. Kinerja keuangan dapat dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui sisi penerimaan (*fiscal availability*) dan pengeluaran (*fiscal needs*). Berdasarkan hasil analisis, tingkat ketergantungan fiskal Kota Padang ke Pusat pada tahun 2014-2018 dapat dikatakan sudah mandiri dengan pola hubungan partisipatif antara pemerintah daerah dengan pusat, hal ini menjelaskan bahwa Kota Padang sudah dapat melaksanakan urusan otonominya sendiri dan mulai tidak terlalu bergantung terhadap Pemerintah Pusat.

Kata Kunci : Ekonomi, Kota Padang, Pembiayaan Pembangunan

ABSTRACT

*The evaluation of the performance of regional financing development is necessary for optimal implementation of decentralization and regional autonomy. Padang city has the lowest average special allocation fund of 4.29%, whereas the city of Padang is the capital of West Sumatra Province. Therefore in this study the researcher aimed to assess the financial performance of Padang city. The analytical method used is quantitative descriptive analysis with the help of diagrams and tables. Financial performance can be analyzed using two approaches, namely through the revenue (*fiscal availability*) and expenditure (*fiscal needs*). Based on the results of the analysis, the level of fiscal dependence of Padang City to the central government in 2014-2018 can be said to have been independent with a pattern of participatory relations between the local government and the central government, this explains that the City of Padang has been able to carry out its own autonomous affairs and began to not be too dependent on the Central Government*

Keywords: Economic, Financing Development, Padang City

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah secara luas nyata dan bertanggung jawab diperlukannya upaya untuk mengoptimisasikan sumber-sumber pembiayaan

pelaksanaan pembangunan daerah. Supaya hal tersebut terlaksana dengan optimal maka diperlukannya penilaian terhadap kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah penggalan dan peningkatan sumber-sumber pembiayaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah. Semakin tersedia cukup sumber-sumber pembiayaan, maka diharapkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah semakin besar. Selain itu penilaian kinerja pembiayaan pembangunan suatu daerah sangat diperlukan untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang optimal.

Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Sumber daya alam tersebut bersumber dari bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah, jasa dan perdagangan. Perekonomian Sumatera Barat umumnya didominasi oleh bidang pertanian yang merupakan sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Sumatera Barat. Bidang pertanian merupakan sumber bahan baku utama bagi bidang industri. Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada triwulan II 2019 mengalami penurunan mencapai 50,59% atau senilai Rp3,25 triliun, dan 34,16% atau senilai Rp2,27 triliun. Di sisi lain, realisasi pendapatan dan belanja 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan II 2019 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni mencapai 47,05% atau senilai Rp9,41 triliun, dan 31,33% atau senilai Rp6,67 triliun. Sedangkan realisasi belanja APBN melalui kementerian atau lembaga di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi 33,70% atau senilai Rp3,72 triliun. Kualitas belanja pemerintah di Sumatera Barat dinilai belum optimal karena didominasi belanja pegawai sebesar 51,27% atau senilai Rp6,51 triliun, diikuti belanja barang dan jasa 25,19% senilai Rp3,12 triliun, dan belanja modal 11,24% senilai Rp1,32 triliun. kabupaten/kota yang memiliki kinerja PAD terhadap pendapatan daerah lebih dari 10%.

Dana alokasi umum di kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu sebesar 70,59%. Perkembangan Dana Alokasi khusus di kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu sebesar 9,04%. Rata-rata dana alokasi khusus tertinggi adalah Kabupaten Solok Selatan yaitu sebesar 10,30%. Sementara itu, Kota Padang mempunyai rata-rata dana alokasi khusus paling rendah yaitu sebesar 4,29%, padahal kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Oleh Karena itu pada penelitian ini Peneliti bertujuan untuk menilai kinerja keuangan daerah Kota Padang.

2. STUDI LITERATUR

2.1 Pembiayaan Pembangunan

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah yang ber sumber dari dalam maupun luar daerah. Yang termasuk kedalam sumber pembiayaan pembangunan dari dalam daerah itu sendiri yaitu, Pendapatan Asli Daerah (hasil Pajak

daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah), Dana Perimbangan (Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya yang sah).

Dalam upaya mengoptimalisasi sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab salah satu bisa dilakukan dengan mengevaluasi atau nilai kinerja pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu unsur dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah penggalan dan peningkatan sumber-sumber pembiayaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Semakin tersedia cukup sumber-sumber pembiayaan, maka diharapkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah semakin besar.

2.2 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berarti sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan.

Pembangunan ekonomi meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan keseluruhan usaha – usaha pembangunan juga meliputi usaha pembangunan sosial, politik, dan budaya. Bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses, dimana suatu Negara dapat menggunakan sumber daya produksi sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut. Pembangunan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita dan meningkatnya keahlian. Karena suatu kemajuan tidak hanya diukur dengan pendapatan per kapita melainkan juga produktivitasnya. Pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

2.3 Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2.4 Kinerja Keuangan Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan

pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan kinerja keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

3. METODOLOGI

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Penelitian penilaian kinerja keuangan ini dilakukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Padang, yang dilihat dari Kinerja Efisiensi, Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Padang dalam Efektifitas Pencapaian Hasil Pembangunan Suatu Daerah, Kinerja Keuangan Daerah Kota Padang dalam Sisi permintaan dan pengeluaran selama lima tahun dari tahun 2014 – 2018 dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh para ahli.

3.3 Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dan informasi pada penilaian kinerja keuangan daerah kota padang ini yaitu data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun dari tahun 2014 – 2018.

3.4 Metode Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan bantuan diagram dan tabel. Kinerja keuangan dapat dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui sisi penerimaan (*fiscal availability*) dan pengeluaran (*fiscal needs*). Pendekatan dari sisi penerimaan yaitu mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal untuk mengetahui kemampuan keuangan yang berasal dari daerah, Derajat Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mengetahui kemampuan keuangan dalam bentuk dana bagi hasil dan transfer dari pusat. Pendekatan dari sisi pengeluaran yaitu mengukur kinerja pengeluaran rutin, kinerja pengeluaran pembangunan, derajat kemandirian dan Efektifitas Pencapaian Hasil Pembangunan Suatu Daerah.

3.4.1 Pendekatan dari sisi Penerimaan

- a. Kemampuan Keuangan yang Berasal dari Daerah

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

- b. Kemampuan Keuangan yang Berasal dalam bentuk dana bagi hasil

$$DPS = \frac{BHPBN}{TPD} \times 100\%$$

- c. Kemampuan Keuangan yang berasal dari transfer pusat

$$DKP = \frac{SB}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

- DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal
 DPS : Derajat Potensi SDA dan SDM
 DKP : Derajat Ketergantungan Daerah Pada Pusat
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 SB : DAU + DAK
 BHPBN : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 TPD : Total Penerimaan Daerah
 (PAD + BHPBN + Lain-lain Pendapatan yang Sah)

3.4.2 Pendekatan dari sisi Pengeluaran

- a. Kinerja Pengeluaran Rutin

$$DBR = \frac{BR}{TBD} \times 100\%$$

- b. Kinerja Pengeluaran Pembangunan

$$DBP = \frac{BP}{TBD} \times 100\%$$

- c. Efektifitas Pencapaian Hasil Pembangunan Suatu Daerah

- c.1 Kinerja Belanja Pembangunan Perkapita (KBPPK)

$$KBPPK = \frac{TBP}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

- c.2 Distribusi Belanja Pembangunan Perwilayah (DBPW)

$$DBPW = \frac{TBP}{\text{Luas Wilayah}}$$

Keterangan :

- DBR : Derajat Belanja Rutin Daerah
 DBP : Derajat Belanja Pembangunan daerah
 BR : Belanja Rutin
 BP : Belanja Pembangunan
 TBD : Total Pengeluaran Daerah (BR + BP)
 TBP : Total Belanja Pembangunan

Tabel 1. Klasifikasi Kinerja Keuangan Daerah

Kriteria	Klasifikasi
Sangat Tinggi	>0.50
Tinggi	0.36-0.50
Rendah	0.20-0.35
Sangat Rendah	<0.20

Sumber: muta'ali (2015)

3.4.3 Derajat kemandirian

$$KFDP = \frac{PAD}{DP} \dots\dots\dots(1)$$

$$KFDP = \frac{DP}{TPD} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- KFDP : Ketergantungan Fiskal Daerah ke Pusat
 PAD : Pendapatan Asli daerah
 DP : Dana Perimbangan dari pusat
 (DAU + DAK + DBH)
 TPD : Total Penerimaan Daerah
 (PAD + Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah + Pinjaman Daerah + Penerimaan Lainnya)

Tabel 2. Klasifikasi Fiskal Daerah Pusat

Nilai KDFP	Klasifikasi	Pola Hubungan Pusat dengan Daerah
<0,25	Sangat Tidak Mandiri	Instruktif
0,26-0,50	Tidak Mandiri	Konsultif
0,51-0,75	Mandiri	Partisipatif
>0,75	Sangat Mandiri	Delegatif

Sumber: muta'ali (2015)

Pola Hubungan Keuangan Pusat – Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah terdiri dari 4 Pola :

1. **Pola Hubungan Instruktif**, Peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada Kemandirian pemerintah daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. **Pola Hubungan Konsultif**, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan urusan otonomi.
3. **Pola Hubungan Partisipatif**, Peranan Pemerintah Pusat semakin Berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati sudah mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. **Pola Hubungan Delegatif**, Campur Tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kinerja Keuangan Kota Padang dikaji dari sisi Penerimaan

4.1.1 Kemampuan Keuangan Daerah yang Murni Berasal dari Daerah (PAD)

Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 3. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang tahun 2014-2018

Tahun	DDF	Keterangan
2014	0.141	Sangat Rendah
2015	0.191	Sangat Rendah
2016	0.199	Sangat Rendah
2017	0.261	Rendah
2018	0.258	Rendah

Sumber: Hasil Analisis,2019

Hasil analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dapat diketahui bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang pada tahun 2017-2018 mengalami perubahan nilai DDF yang rendah setelah 3 tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014-2016 memiliki nilai DDF yang sangat rendah, hal ini menjelaskan bahwa pemerintah Kota Padang masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal masih rendah. Kota Padang belum mampu melaksanakan desentralisasi fiskal yang

disebabkan pendapatan asli daerah yang masih rendah, dimana PAD hanya mengharapkan pemasukan tinggi dari pajak sementara pemasukan dari SDA dan SDM masih sangat rendah.

4.1.2 Kemampuan Keuangan yang Berasal dari Transfer Pusat dalam Bentuk Dana Bagi Hasil

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh klasifikasi Derajat Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Kota Padang Tahun 2014-2018 dikategorikan sangat rendah atau tidak mengalami perubahan pada lima tahun terakhir, hal ini menjelaskan bahwa tidak terdapat potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral yang dapat menunjang kinerja keuangan pemerintah Kota Padang. Meskipun merupakan kota dengan penduduk terpadat di Provinsi Sumatera Barat, Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Kota Padang masih belum dapat menunjang kinerja keuangan daerah Kota Padang karena potensi sumber daya alam yang terdapat di Kota Padang hanya dari sektor pariwisata sehingga belum dapat menunjang kinerja keuangan Kota Padang dengan penduduknya yang sangat padat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4. Derajat Potensi SDA dan SDM Kota Padang tahun 2014-2018

Tahun	Nilai	Keterangan
2014	0.034	Sangat Rendah
2015	0.024	Sangat Rendah
2016	0.032	Sangat Rendah
2017	0.031	Sangat Rendah
2018	0.036	Sangat Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2019

4.1.3 Kemampuan Keuangan yang Berasal dari Transfer Pusat yang Bersifat Bantuan dari Pusat

Pada analisis Derajat Ketergantungan Daerah Kota Padang diketahui bahwa Derajat Ketergantungan kota padang pada pusat selama lima tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sangat tinggi, hal ini menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Padang terhadap Pemerintah Pusat sangat tinggi yang disebabkan tingginya angka dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap total pendapatan daerah Kota Padang. Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan pemerintahan lebih banyak dan besar di Kota Padang, itulah alasan mengapa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Kota Padang sangat tinggi sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan Kota Padang masih bergantung terhadap pemerintahan pusat.

Tabel 5. Derajat Ketergantungan Daerah Kota Padang tahun 2014-2018

Tahun	Nilai	Keterangan
2014	0.60	Sangat Tinggi
2015	0.58	Sangat Tinggi
2016	0.69	Sangat Tinggi
2017	0.66	Sangat Tinggi
2018	0.59	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2019

4.2 Analisis Kinerja Keuangan Kota Padang dikaji dari sisi Pengeluaran

4.2.1 Kinerja Pengeluaran Rutin

Pada analisis Kinerja Belanja Rutin Kota Padang selama lima tahun yaitu dikategorikan sangat tinggi pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena belanja rutin masih mendominasi pengeluaran belanja rutin di Kota Padang, 96,33 persen belanja pegawai dari belanja tidak langsung dan 91,50 persen belanja pegawai dari belanja langsung.

Tabel 6. Derajat Belanja Rutin Kota Padang tahun 2014-2018

Tahun	Nilai	Keterangan
2014	0.73	Sangat Tinggi
2015	0.71	Sangat Tinggi
2016	0.69	Sangat Tinggi
2017	0.65	Sangat Tinggi
2018	0.67	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisis,2019

4.2.2 Kinerja Pengeluaran Pembangunan

Derajat Belanja pembangunan Kota Padang tahun 2014-2018 dikategorikan rendah, hal ini disebabkan karena infrastruktur Kota Padang sudah mulai terpenuhi sehingga pengeluaran lebih banyak untuk sektor belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

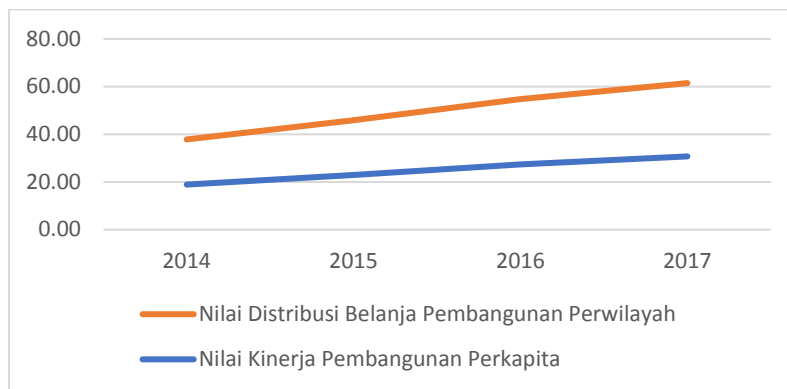
Tabel 7. Derajat Belanja Pembangunan Kota Padang tahun 2014-2018

Tahun	Nilai	Keterangan
2014	0.26	Rendah
2015	0.28	Rendah
2016	0.30	Rendah
2017	0.34	Rendah
2018	0.32	Rendah

Sumber: Hasil Analisis,2019

4.1.3 Efektifitas Pencapaian Hasil Pembangunan Kota Padang

Kinerja Keuangan daerah dari sisi pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh efektifitas Pencapaian hasil pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi dana APBD yang digunakan suatu daerah maka semakin tinggi kinerja Pembangunan Kota Padang tersebut. Efektifitas Pencapaian Hasil Pembangunan Suatu Daerah dianalisis dengan melihat kinerja belanja pembangunan perkapita dan distribusi belanja pembangunan perwilayah, hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Gambar 1 : Efektifitas Pencapaian Hasil Pembangunan Kota Padang

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kinerja belanja pembangunan perkapita kota padang selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitupun dengan distribusi belanja pembangunan perwilayah di Kota padang juga selalu mengalami peningkatan.

4.1.4 Derajat Kemandirian Daerah/ Ketergantungan Fiskal Kota Padang ke Pusat

Perkembangan pengelolaan keuangan daerah dapat ditinjau dari derajat kemandirian daerah atau ketergantungan fiskal daerah ke pusat, yang mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari dalam daerah sendiri mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan perbandingan antara kemampuan keuangan daerah atau pendapatan asli daerah yang berasal dari pusat atau dana perimbangan.

Tabel 8. Nilai Fiskal Kota Pdang ke Pusat Tahun 2014-2018

Tahun	Nilai Fiskal Kota Padang ke Pusat	Jenis Pola Hubungan
2014	0.64	Partisipatif
2015	0.60	Partisipatif
2016	0.73	Partisipatif
2017	0.65	Partisipatif
2018	0.63	Partisipatif

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan Analisis, Tingkat Ketergantungan Fiskal Kota Padang ke Pusat pada tahun 2014-2018 memiliki nilai diantara 0.51-0.75 atau dapat dikatakan sudah mandiri dengan pola hubungan partisipatif. Pola hubungan partisipatif menjelaskan bahwa peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat Kota Padang tingkat kemandiriannya mendekati sudah mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang pada tahun 2014-2018 dikategorikan sangat rendah pada tahun 2014-2016 dan mengalami kenaikan ke kategori rendah pada tahun 2017-2018 hal ini menandakan bahwa Kota Padang masih belum mampu melaksanakan desentralisasi fiskal karena ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

Derajat Potensi SDA dan SDM Kota Padang tahun 2014-2018 sangat rendah dan mengalami perubahan nilai yang naik turun pada setiap tahunnya. Derajat Ketergantungan Kota Padang ke Pusat Kota Padang tahun 2014-2018 Sangat Tinggi. Derajat Belanja Rutin Kota Padang tahun 2014-2018 dikategorikan sangat tinggi. Derajat Belanja Pembangunan Kota Padang tahun 2014-2018 dikategorikan rendah. Rasio Belanja Penduduk Perkapita Kota Padang tahun 2014-2018 rata-rata meningkat setiap tahunnya. Distribusi Belanja Pembangunan Perwilayah Kota Padang tahun 2014-2018 rata-rata meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan analisis, tingkat ketergantungan fiskal Kota Padang ke Pusat pada tahun 2014-2018 dapat dikatakan sudah mandiri dengan pola hubungan partisipatif antara pemerintah daerah dengan pusat, hal ini menjelaskan bahwa Kota Padang sudah dapat melaksanakan urusan otonominya sendiri dan mulai tidak terlalu bergantung terhadap Pemerintah Pusat.

REFERENSI

Buku

- Adisasmita R. 2010. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Penerbit: Graha Ilmu. Makasar.
- Agustina. 2015. *Analisis Rasio Untuk menilai Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Agnes. Sawir. (2015). *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keuangan*. Perusahaan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Irham. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ma'ruf M. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Halim. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Di Indonesia*, Vol 16 no 12 Desember 2008, Jakarta.
- Hanafi. Mamduh M. dan Abdul Halim. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Tujuh. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Juliani Dora. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan*. Yogyakarta (ID): Universitas Sanata Dharma.
- Lidia Mariani. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan, Artikel Ilmiah*, Dalam: *Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*, juni 2013
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Penerbit Rajawali Pers.
- Munawir S. 2000. *Analisa Laporan Keuangan* . Yogyakarta : Liberty.
- Munawir S. 2002. *Laporan Keuangan* . Yogyakarta : UPP-AMP YKPN.
- Muta'ali L. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilaya, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta : UGM.
- Priyarsono DS. 2013. *Dari Pertanian ke Industri Analisis Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Regional*. Bogor: IPB Press.
- Pusdiklatwas. 2008. *Kode Etik dan Standar Audit*. Edisi Kelima. Bogor
- Pusdiklatwas. 2010. *Penulisan Laporan Hasil Audit*. Edisi Kelima. Ciawi
- Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Seruyan*.
- Sawir, Agnes. 2005. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.